

# LEARNING DESIGN OF CITIZENSHIP EDUCATION IN INDONESIA AFTER AHOK TRAGEDY, A SHAPE OF SOCIAL MEDIA AND CRITICAL-LITERACY IN EDUCATIONAL PROCESS

Husniyatus Salamah Zainiyanti  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: husniyatus@yahoo.com

Atmari  
Sekolah Tinggi Agama Islam al Azhar Menganti Gresik, Indonesia  
E-mail: atmarinj@gmail.com

**Abstract:** From the first decade when Soekarno declared Indonesia as Pancasila State, until 71st independence nowadays. Educationally, Indonesia had not an ideal concept how to indoctrinate its form of pluralistic cultures and religions, which were emerged and lived in. Differently from another democratic countries, like USA, Australia, and European-Community, which faced the multi-ethnic diaspora, new social movement groups, and immigrant people, they reconcile the new concept of citizenship education system within social and cultural changes, as well as they faced. In fact, citizenship education often delivers as a political education as usual. There are no new approaches and systematic curricular changes to adopt and adapt what presently happens in the grassroot-society. So that, this article will explore some progressive problems that shifted the pluralistic stance of Indonesian People. Eventually, based on educational system and teaching learning processes in general school. The ultimate aims are growing approaches to teach pure Indonesian citizenship values, seem like, what democratic countries did for their citizens, after political abnormal contestation, such as the rise of radicalism, ethnic or racial conflict, and so on. Thus, this article also will focus on 'Ahok Tragedy' which are re-contested as a living historical conflict; Islamic and Nationalist stance of Indonesian identity.

**Keyword:** Learning Design, Citizenship Education, Critical-Literacy, Educational Process

## Pendahuluan

Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, tidak pernah ditanggalkan sebagai bagian dari pembentukan dan pembangunan identitas kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan selalu menjadi buku ajar (*subject matter*) yang diinternalisasi pada setiap tingkatan institusi pendidikan. Hanya saja, proses transmisi keilmuannya, cenderung diposisikan sebagai pemindahan ilmu pengetahuan biasa atau didesain sebagaimana ilmu pengetahuan kognitif semata, tidak diindoktrinasi sebagai nilai prinsipil yang harus dipegang teguh oleh setiap

masyarakat. HAR. Tilaar mengatakan bahwa, dalam sejarah setiap bangsa, mata ajar *civic education* merupakan instrumen politis, advokatif, hegemonik, dan ideologis negara, untuk membangun kebudayaan bangsa, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Meskipun, Tilaar meminjam ungkapan Selo Sumardjan, mengatakan jika nilai-nilai kebudayaan, social, politik, dan ekonomi yang hinggap di Indonesia tidak pernah stabil. Nilai-nilai tersebut bergeser terus menerus tanpa bentuk ideal.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada anggapan tersebut, penulis pun berpendapat, jika *civic education* di Indonesia harus diupayakan menjadi pintu utama membentuk sistem kebudayaan ideal dan menghiasi sikap-sikap para generasi muda yang ada saat ini. Tentu, untuk mencapainya, dibutuhkan beberapa strategi dan pendekatan yang secara gradual bisa dilakukan. *Pertama*, secara politis, negara harus bisa tampil memberikan keberpihakannya pada nilai dan ideology kebangsaan Indonesia. *Kedua*, lembaga pendidikan semestinya mendesiminasikan nilai tersebut sebagai holding culture pembentukan nilai kebangsaan. *Ketiga*, memperkuat interkoneksi antara kehidupan sekolah dengan kehidupan social di masyarakat. *Kempat*, melakukan pembelajaran antisipatif dan memberikan penyadaran kepada generasi muda menghadapi globalisasi yang tidak bisa dikendalikan, hanya menggunakan satu pendekatan saja.

Secara politis (baca: keberpihakan pemerintah terhadap identitas dan ideology bangsa), kesuksesan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) pernah diraih pada Orde Lama dan Orde Baru, walaupun pada akhirnya, dimasa keduanya, kekuasaan politiknya berakhir dalam bentuk tragedi politik nasional; perang melawan komunisme di era Orde Lama, hingga krisis multi dimenasi di era Soeharto. Kesuksesan Orde Lama membangun kesadaran ke-Indonesia-an, disebabkan masih kuatnya dentuman darah juang membela kolonialisme. Perang ide dan gagasan membangun identitas Indonesia, nampak lebih penting dibandingkan, politik memenangkan kepentingan etnis, agama, suku, dan budaya tertentu. Kegagalan mereka, kala itu, adalah membangun kesinambungan politik nasional. Akhirnya, konflik dua kelompok besar di Indonesia terjadi; antara komunisme (pengikut Soekarno) dan kelompok Islam.

---

<sup>1</sup> HAR Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan* (Bandung; Rinneka Cipta Press, 2003), 284

<sup>2</sup> Tilaar, *Pendidikan*, 285

Di era Orde Baru, politik penyatuan (*unity in diversity at multicultural society*), dirubah menjadi penyeragaman (*uniformity*) pandangan politik. Politik pendidikan kewarganegaraan diwujudkan pada proyek pembangunan kesadaran semu (*false-consensiousness*), melalui program pendidikan, pelatihan, penghayatan Pancasila (P4). Program ini seakan-akan ‘memaksa’ masyarakat hanya mengenal asas tunggal Indonesia. Program ini juga didekati melalui cara membungkam perbedaan-perbedaan ideologis di masyarakat tampil ke permukaan (*social and political appireance*). Kelebihan program ini ialah, pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan sosial-masyarakat. Kelemahannya, tentu, pola indoktrinasi ini, menjadikan masyarakat menganggap masyarakat Indonesia satu haluan dan tidak mendapatkan tantangan dari dunia luar. Akhirnya, kekuatan dan kekuasaan penyeragaman ini dikalahkan oleh gerakan masyarakat sipil yang sadar penyeragaman politik kenegaraan, bukanlah format ideal di masyarakat modern.

Dalam bingkai dunia pendidikan, dari masa ke masa kepemimpinan politik di Indonesia, pastinya tidak banyak berubah. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata ajar yang wajib diinfokan kepada para siswa dan peserta didik. Namun, era reformasi dan kebebasan informasi memberikan tantangan baru. Kondisi atau iklim belajar di lembaga pendidikan sudah jauh berubah. Kontrol pemerintah sudah habis, karena perubahan perundang-undangan yang dirumuskan karena sistem politik yang berubah. Oleh karenanya, pada bagian inilah penulis ingin memberikan gagasan baru bagaimana idealnya pendidikan kewarganegaraan bisa tampil sebagai solusi persoalan identitas kebangsaan yang ada. Sebagaimana diketahui, tragedy Pilkada Jakarta<sup>3</sup> memberikan gambaran kongkrit bagaimana ada *living conflict* di Indonesia, yang apabila dipolitisi bisa merubah *mindset* sikap kebangsaan Indonesia, dari sekedar cinta

---

<sup>3</sup> Adalah *common sense* (kesadaran bersama) apabila kita mengkategorikan Pilkada Jakarta sebagai bentuk tragedy kebangsaan yang harus ditanggapi serius oleh banyak orang. Pilkada Jakarta menghadirkan banyak kontestasi model perpolitikan. Apakah itu drama keberpihakan umat Islam terhadap pemimpin Islam, bahkan sebaliknya, umat Islam lain terhadap non-muslim. Adanya keberpihakan kelompok tertentu pada pilihan kesukuan, ras, dan kebudayaan. Adanya drama dan mobilisasi masa untuk lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan dibandingkan sikap ke Indonesia. Semua itu hampir terekam secara lengkap dari pelbagai liputan media; cetak atau elektronik. Bahkan kekhawatiran Buyah Syafi'i Ma'arif imbas Pilkada Jakarta akan menumbuhkan banyak sikap intoleran di Indonesia masih menjadi perbincangan hingga sekarang. (Lihat; Tentang Intoleransi, Buya Syafi'i; Ada ideologi impor yang salah arah <http://m.detikcom/news/berita-jawa-tengah/d-3585541/tentang-budaya-intoleransi>, diakses pada 4 Agustus 2017).

tanah air ke arah yang konfrontatif; baik itu berbasis agama atau komunalitas yang berkembang di Indonesia.

Selain itu, Pilkada Jakarta juga menunjukkan fakta lain yang menunjukkan jika media social hari ini bisa menjadi instrument pembantu dan perusak sikap kebangsaan di Indonesia. Pendekatan kampanye yang digunakan tim sukses menghadirkan apa yang penulis sebut sebagai ‘demistifikasi (ajaran) Islam terhadap nilai-nilai nasionalisme’. Hal ini pulalah yang ingin penulis diskursikan untuk membetuk rumusan integrative pandangan Islam dan Nasionalisme sebagai bingkai pembentukan karakter kebangsaan Indonesia melalui desain pendidikan kewarganegaraan khas Indonesia. Sebab, Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari sistem kenegaraan, dan bukan negara agama yang menghilangkan nilai-nilai demokrasi (modern) seperti yang ada di negara Islam. Indonesi menganut identitas Pancasila yang menggabungkan keduanya.

Untuk mendesiminasikan gagasan ini, penulis akan membagi tulisan ini menjadi tiga topik penting; *pertama, problem of civic education in between to face living conflict of indonesian social construction*. Pada bagian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah paradigma sosiologis-antropologis, terkait model dan desain pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. *Kedua, new emerging social-media and its civic educational issue*. Topik ini akan menggali beberapa kecenderungan baru masyarakat menggali informasi dan pengetahuan dalam mengkonstruk pemahaman kenegaraannya, termasuk di dalamnya para pelajar atau peserta didik yang ada di lembaga pendidikan. *Ketiga, renewal approaches; media design, progressive content, and instructional dilivering*. Pembahasan terakhir ini, penulis akan menggambarkan cara-cara baru pendidikan kewarganegaraan yang dibentuk melalui sistem; pengajaran, pemahaman, dan pemantapan sikap, sesuai dengan kecenderungan sosial-masyarakat modern.

## **Indonesian Citizenship; Describing Living Conflict and Civic Education Concept**

Setuju atau tidak, sumber utama problem kewarganegaraan (sebagai proses internalisasi nilai kebangsaan dan kenegarawanan), pasca kemerdekaan, terbagi menjadi tiga pola; *pertama*, konflik ideologis antara kelompok islamis dan nasionalis, dimulai awal proses perencanaan sistem politik nasional hingga pembangunan ekonomi nasional. *Kedua*, konflik identitas kelompok agama mayoritas di Indonesia (internal umat beragama Islam), yang terkadang menghilangkan hak-hak minoritas. *Ketiga*, dominasi ekonomi Indonesia yang cenderung dikuasai oleh dua kekuatan tertentu. Jarang sekali terlihat, konflik kebangsaan yang diprakarsai oleh kepentingan suku, ras, dan perbedaan kebudayaan (dalam arti sempit) yang berkembang di Indonesia. Mungkin, masyarakat Indonesia, sangat menyadari bahwa mereka berasal dari suku, budaya, bahasa, dan perilaku sosial yang berbeda-beda. Tapi, tidak pada kesadaran keberagaman beragama.

Anggapan di atas didasarkan pada rutusnya konflik internal dan eksternal umat beragama di Indonesia. Sebagaimana laporan Setara Institute, Puslitbang Kementerian Agama, dan beberapa lembaga survey lainnya, menunjukkan bahwa, tidak ada perubahan yang signifikan terkait toleransi agama di Indonesia. Posisi Indonesia masih berada pada garis rentan atau rawan konflik agama, apabila dibenturkan dengan kepentingan politik lokal ataupun nasional.<sup>4</sup> The Wahid Institute melaporkan, eskalasi konflik keberagaman sedikit menurut di Tahun 2014. Hal ini disebabkan; *pertama*, liputan media terfokus pada kampanye politik Pileg dan Pilpres. *Kedua*, para elit politik sibuk membangun citra politik untuk menarik simpati masyarakat. *Ketiga*, di dalam diri masyarakat pula, fokus utama mereka adalah menentukan pilihan politik.<sup>5</sup>

Hasil sedikit berbeda pasca pemilu, eskalasi kekerasan atas nama agama, kembali meningkat. Para elit politik, tampak kembali memainkan peran antagonisnya, untuk mencapai tujuan politik pragmatis, beberapa tahun ke depan. Dampaknya,

---

<sup>4</sup> Tim Survey Setara Institute, "Laporan Survei Toleransi Siswa Negeri di Jakarta dan Bandung Raya" (Jakarta; Setara PDF version, 2016), xx

<sup>5</sup> Achmad Suaedy, dkk "Laporan Tahunan Kerukunan Keberagamaan di Indonesia" (Jakarta; The Wahid Institute, 2014), 7

sikap islamisme dan nasionalisme ditampilkan menggunakan paradigma dikotomis. Oleh karena itulah, diperlukan kerangka masif dan sistemik untuk menghindari konflik-konflik seperti itu tampil lagi, kemudian menimbulkan kebimbangan sikap kebhinnekaan di dalam masyarakat. Tentunya, penulis juga tidak abai, bahwa pemerintah udah melakukan pelbagai cara dan upaya meminimalisir pemahaman tersebut. Salah satunya adalah dengan menggencarkan pendidikan kewarganegaraan.

Dari perspektif global, pendidikan kewarganegaraan selalu direvisi sesuai momentum dan perkembangan zaman. Menurut M. Apple, kesenjangan kepentingan globalisme dan lokalisme harus bisa diadaptasi, agar kontestasi ideologis yang terjadi di luar sekolah bisa dipahami oleh para generasi penerus. Dia memberikan contoh, bagaimana pendidikan kewarganegaraan di Amerika, harus direvisi tidak sekedar membicarakan etnisitas yang berkembang di dalam masyarakat. Melainkan masyarakat dan konflik baru yang ada akibat globalisasi. Sebagai seorang sosiolog pendidikan, tawaran Apple, kala itu, adalah melakukan *social-contestation to win the ideal and good model of American citizenship*. Sedang peran lembaga pendidikan adalah mereduksi proses hegemoni politik yang ditampakkan oleh kekuatan sosial (*social power*) yang ada di luar isolated places tersebut.<sup>6</sup> Di Prancis, konflik utama negara ini adalah terorisme dan radikalisme Islam. Pasalnya, sejarah negara ini tidak pernah bisa lepas dari kolonialisme negara-negara Afrika, yang mayoritas beragama Islam. Hari ini, negara ini sedang menghadapi imigran muslim secara besar-besaran, dari negara Islam yang dilanda peran tak kunjung usai.<sup>7</sup> Di Inggris, pendidikan kewarganegaraan lebih sederhana dan lebih fleksibel. Inggris, secara sistem politik-global, tidak memiliki persoalan kewarganegaraan. Dibandingkan negara Eropa lainnya, yang mamiliki konflik masa lalu. Sehingga, pendekatan yang digunakan lebih *long term design*; seperti penggabungan pemahaman agama di dalam sekolah.<sup>8</sup>

Secara teoritik-praktis, di beberapa demokratis, pendidikan kewarganegaraan selalu terintegrasi dengan pendidikan formal, informal, dan selalu menjadi *public sphere discussion*. Cogan, dalam J. Demaine, menyebutkan bahwa semua bentuk pendidikan

---

<sup>6</sup> Michael W. Apple, *The States and Politics of Knowledge* (New York, Taylor Francis, 2003), 34

<sup>7</sup> Jack Demaine, ed, *Citizenship and political education today* (New York; Palgrave Macmillan, 2004), 89

<sup>8</sup> John Ahier et al, *Issues of Citizenship and Higher Education* (London; Ruotledge Falmer, 2005), 35

kewarganegaraan di dunia selalu mengindikasikan beberapa aspek; *pertama*, menjadikan pendidikan sebagai alat reproduksi pengalaman dan pengetahuan untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal yang diyakini. *Kedua*, proses pembelajarannya bersumber dari nilai dasar dan fenomena-fenomena kekinian yang terjadi di dalam masyarakat. *Ketiga*, pembentukan karakter individual agar mampu beradaptasi dengan zaman.<sup>9</sup> Rob Moore menyebut bahwa pendidikan kewarganegaraan harus selalu dimodifikasi sebab perubahan sistem politik dan kontestasi lokal.<sup>10</sup> Dia mengusulkan konsepsi-konstruktivis pendidikan kewarganegaraan, yaitu; *pertama*, ideologi dan identitas asli negara. *Kedua*, perkembangan pola hidup dan gaya masyarakat modern. *Ketiga*, migrasi dan multikultural-dialektis yang terjadi di beberapa negara maju. *Keempat*, terdesain melalui dua model kurikulum di lembaga pendidikan; *instructional and experiential desain*.<sup>11</sup>

Pada kajian paling mutakhir, para sosiolog pendidikan, membingkai *content* pendidikan kewarganegaraan, menggunakan kerangka; *pertama*, pentingnya rasa pemilikan terhadap identitas kenegaraan. *Kedua*, *act as enjoyment of rights*. *Ketiga*, *the considering fulfillment of corresponding obligations, and a degree of interest and also involvement in public affairs*. *Keempat*, *an acceptance of basic social values*.<sup>12</sup> Adapula yang menyederhanakan kosepsinya sebagaimana berikut; penginternalisasi *civic virtues*,<sup>13</sup> *civic knowledge*,<sup>14</sup> dan *civic*

---

<sup>9</sup> Ahier, *Issues of Citizenship*, 27

<sup>10</sup> Jack Demaine, et al *Citizenship and political education today*...90

<sup>11</sup> Rob Moor, "Graduate Citizen?; Evidence and interpretation, in John Ahier et al *Issues of Citizenship and Higher Education* (London; Routledge Falmer, 2005), 93

<sup>12</sup> Moor, *Graduate Citizen*, 94

<sup>13</sup> *Civic virtues* berisikan tentang bagaimana memperlakukan karakter, sikap, dan komitmen untuk melaksanakan proses demokratisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh sikap dan perilaku tersebut adalah *individual responsibility* (tanggung jawab pribadi), *self-discipline* (kedisiplinan), *integrity* (integritas), *patriotism* (jiwa kepahlawanan), *toleration of diversity* (menghargai perbedaan/keberagaman), *patience and consistency* (kosabaran dan konsistensi), and *compassion for others* (peduli terhadap sesama).

<sup>14</sup> *Civic knowledge* mencakup ide dasar dan informasi (fundamental ideas and information) yang seorang siswa harus bisa mengatahainya, sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap nilai-nilai demokrasi dan kenegaraan yang dijadikan prinsip dalam bernegara. *Civic knowledge*, secara umum, dibingkai terkait tentang pengetahuan akan sistem pemerintahan, sistem politik, institusi bernegara, dan relasi negara dan masyarakat. Pengetahuan tentang sistem kenegaraan ini, di Indonesia, sempat dipaparkan secara berlebihan di era Orde Baru, dimana para siswa diwajibkan menghafalkan semua menteri yang membantu sistem kerja kepresidenan.

*skill*.<sup>15</sup> Semua hal di atas, harus pula diikuti dengan penyamaan persepsi melalui proses *parental strategy, social group interaction, and communities understanding also had to be concerned by government*. Jadi, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi pengetahuan, pengalaman, pengamalan, penghayatan, dan modal sosial-politik untuk berinteraksi bersama dengan masyarakat sekitar.

Jika membaca asumsi, data survei, dan konsepsi teoritik tentang pendidikan kewarganegaraan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, tidak banyak dampak yang diberikan dari kebijakan politik dan sistem pembelajaran di lembaga pendidikan, untuk membentuk sistem kemasyarakatan di Indonesia. Hal ini disebabkan kompleksitas persoalan politik, social, dan ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau mau dilihat apa yang dilakukan pemerintah pasca era keterbukaan, upaya untuk menyematkan identitas keindonesiaan pun sudah dilaksanakan secara massif, melalui proyek politik bernama “Sosialisasi Empat Pilar”. Program ini diselenggarakan oleh anggota MPR/DPR semenjak era Taufik Kiemas. Program ini ditujukan untuk menyadarkan masyarakat agar mampu memahami kalau Indonesia memiliki ideology kebangsaan Pancasila, dasar negara UUD 45, identitas masyarakat beragam (Bhinneka Tunggal Eka), dan Negara Kesatuan republic Indonesia. Tapi, tampaknya, program di luar sekolah ini cenderung bersifat proyek dan ala kadarnya. Sosialisasi ini sekedar untuk melaksanakan tugas kenegaraan, tanpa menilai apa dampak yang diberikan. Faktanya, hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih sering terusik oleh ideology baru yang lebih massif dikampanyekan di lingkungan mereka, sebut saja ideology Islam-Transnasional misalnya.

Tidak jauh berbeda di lembaga pendidikan, PKn mungkin masih diajarkan dan diinternalisasi kepada semua siswa. Namun, hanya sekedar untuk menyelesaikan kewajiban mata ajar saja, kemudian dinilai melalui sistem evaluasi kognitif semata.

---

<sup>15</sup> *Civic skills* meliputi keterampilan intelektual dimana seorang siswa mampu memahami, membandingkan, dan menjelaskan prinsip-prinsip yang berbeda diantara sistem kewarganegaraan di pelbagai negara lain. Hal ini penting bagi siswa, agar kesadaran yang sudah dibangun bisa menjadi pilihan sikap rasional untuk memantapkan kecintaannya pada negara yang ditempatinya. Di pihak yang lain, di bidang ini, siswa bisa diajari bagaimana memonitor dan melihat secara kritis pergeseran nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang ada di negaranya. Misalnya, siswa diajari bagaimana kontestasi Pancasila menjadi sebuah ideology dan tantangan yang dihadapinya di dalam pelbagai sistem politik yang ada di Indonesia.

Padahal, sistem ajar pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar pengetahuan, melainkan hal tersebut harus menasar pada aspek karakter dan sikap yang akan dipegang teguh oleh para siswa. Mereka bukan sekedar mengenal apa itu Pancasila, melainkan menginternalisasikannya sebagai pandangan hidup. Tidak sekedar hafal Pembukaan UUD 45, melainkan sebagai rujukan untuk menentukan sikap menghadapi persoalan kebangsaan yang dihadapi. Demikian di kehidupan social, Bhinneka Tunggal Ika, seyogyanya, menjadi sistem pengikat mereka untuk bersosialisasi antar sesama masyarakat Indonesia.

Dari pembacaan terhadap kondisi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia di atas, maka kerentanan dan asumsi bahwa, model pembelajaran tersebut belum sampai pada hal yang ideal, bisa dibenarkan. Hal ini belum ditambah dengan kondisi bangsa yang sudah menjadi sasaran global melalui kampanye disintegritas. Dinamika politik Indonesia, hari ini, bisa dikatakan sebagai pengulangan pola masa lalu, dimana masyarakat Indonesia sudah kehidulangan model hidup kecintaan terhadap tanah air yang diperjuangkannya. Hal yang paling tampak ke permukaan adalah, bagaimana media social bisa mempengaruhi persepsi-persepsi masyarakat digital di Indonesia. Maka dari itu, pada pembahasan selanjutnya, penulis akan mengkaji bagaimana media social sebagai alat propaganda disintegrasi, dirubah menjadi penguat nilai-nilai kebangsaan yang ada di Indonesia.

### **Emerging New Citizen, Media Social and Educational Process**

Tak banyak orang menyangka bahwa ‘media sosial’ akan hadir menjadi penguat sekaligus ‘pengganggu’ stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Pada mulanya, dari sisi fungsi, media sosial hanya alat komunikasi yang dikembangkan dan diperbaharui melalui fitur-fitur teknologis. Media sosial juga sekedar alat bantu mengekspresikan kegelisahan pribadi, untuk dikomunikasikan terhadap orang lain. Tapi, pasca kemenangan politik Obama di Amerika, media sosial berubah menjadi instrumen penting informasi yang dimiliki masyarakat.<sup>16</sup> Tak pelak, media sosial pun akhirnya berubah; dari ekspresi individu mengungkap kegelisahan dan kegamangan

---

<sup>16</sup> Paul Milahidis, *Media Literacy; Empowering Youth Worldwide* (New York; NED & CIMA, 2009), 3

berfikir, bertransformasi menjadi alat paling berpengaruh untuk menentukan sikap politik, sosial, dan bahkan pilihan individu seseorang.

Di Indonesia sendiri, awalnya, media sosial tidak jauh berbeda dengan negara-negara demokrasi lainnya. Para pengguna media sosial, memfungsikan media ini sebagai alat komunikasi, menambah jejaring dan pertemanan, hingga pada proses reaktualisasi diri menemukan eksistensi hidup. Sedang media sosial sebagai instrumen dan alat komunikasi politik, baru disadari pasca pilkada Jakarta dan pemilihan umum Tahun 2019 yang lalu. Dimana Joko Widodo menjadi *trend centre* sosok paling sukses melakukan komunikasi politik menggunakan media sosial. Khususnya, melalui para relawan politik yang bergabung pada Jasmed-Jokowi.

Terlepas dari hanya digunakan sebagai alat politik, Indonesia hari pun menyadari bahwa, masyarakatnya sudah terhubung dengan media sosial. Data Kominfo Tahun 2014 menyebutkan bahwa hampir 95 Juta orang Indonesia terkoneksi melalui media sosial. Facebook dan Twitter menjadi media sosial terbanyak dan terpopuler yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.<sup>17</sup> Data yang lebih mencengangkan lagi, dari 100% pengguna Smartphone, 95% dari mereka menginstall dan menjalankan media sosial.<sup>18</sup> Sedang dari aspek pengguna media sosial, hasil penelitian mengatakan bahwa hampir 30 Juta orang pengguna media sosial adalah anak belia; umur sekolah (kisaran 10-19 Tahun).<sup>19</sup>

Berdasarkan pada data-data penggunaan inilah, mengesampingkan media sosial dalam proses pendidikan bisa menjadi *blunder* tersendiri. Lebih-lebih fenomena media sosial akhir-akhir ini, menunjukkan kecenderungan masyarakat tidak beradab. Presiden Republik Indonesia sendiri menyebutkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia tergolong sadis.<sup>20</sup> Tidak sekedar di Indonesia, di beberapa negara eropa, Jerman, Prancis, dan negara lainnya misalnya, mereka juga merasakan dampak sosial

---

<sup>17</sup> Pada perkembangan terakhir disebutkan ada 129 Juta, hampir 54 % masyarakat Indonesia memiliki media Social, <http://autotekno.sindonews.com/read/1166757/183/jokowi-akui-pengguna-media-sosial-di-indonesia-sadis-1483001812> diakses pada 21 Juni 2017

<sup>18</sup> Pengguna internet di Indonesia lihat: <http://tekno.liputan6.com/read/2823721/95-persen-orang-indonesia-install-aplikasi-media-sosial-di-ponsel> diakses pada 21 Maret 2017

<sup>19</sup> Data kominfo.or.id

<sup>20</sup> Lihat; <http://autotekno.sindonews.com/read/1166757/183/jokowi-akui-pengguna-media-sosial-di-indonesia-sadis-1483001812> diakses pada 21 Maret 2016

dan politik dari keberadaan media sosial. Apakah itu dari sisi positif ataupun dampak negatif, seperti penyebaran Hoax melalui media massa.<sup>21</sup> Maka dari itu, *concern* pemerintah terhadap media sosial, hari ini, lebih kuat dibandingkan sebelum-sebelumnya, termasuk adanya keinginan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan terhadap media sosial.

Oleh karena itulah, setiap problem apapun yang dihadapi negara, lembaga pendidikan akan menjadi titik tumpu perubahan dan perbaikan masyarakat. Jika menilik isu terakhir yang menjadi *trending topic* di media sosial adalah persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Sebut saja misalnya, radikalisme Islam,<sup>22</sup> intoleransi beragama, dan aktivitas politik pecah belah lainnya. Dari ini, penulis beranggapan bahwa, perlunya kematangan dan keaksaraan para pengguna media sosial untuk memahami konten, konteks, sistem sosial, dan sikap individu yang menjadi tanaman nilai di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana disebutkan di atas, harus mampu menyajikan ruang dialektis, integratif, dan advokatif terhadap masyarakat sipil di Indonesia, agar tidak terpengaruh oleh penyebaran-penyebaran isu yang ada di media sosial.

Setidaknya ada dua hal penting untuk membantu memahami hal-hal yang berkembang di dunia maya, kemudian dikoneksikan dengan dunia nyata, yakni melalui sudut pandang normatif dan kreati, terkait dengan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendekatan normatif bermakna pendidikan kewarganegaraan dibangun melalui proses-proses yang lebih kontekstual, selanjutnya, dijadikan sebagai subjek matter di sekolah. Sedangkan cara kreatif, yaitu, menciptakan produk tekhnologis serupa untuk dipahami oleh para siswa lebih cepat. Salah satu contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Ahmad Muhibbin dan Bambang

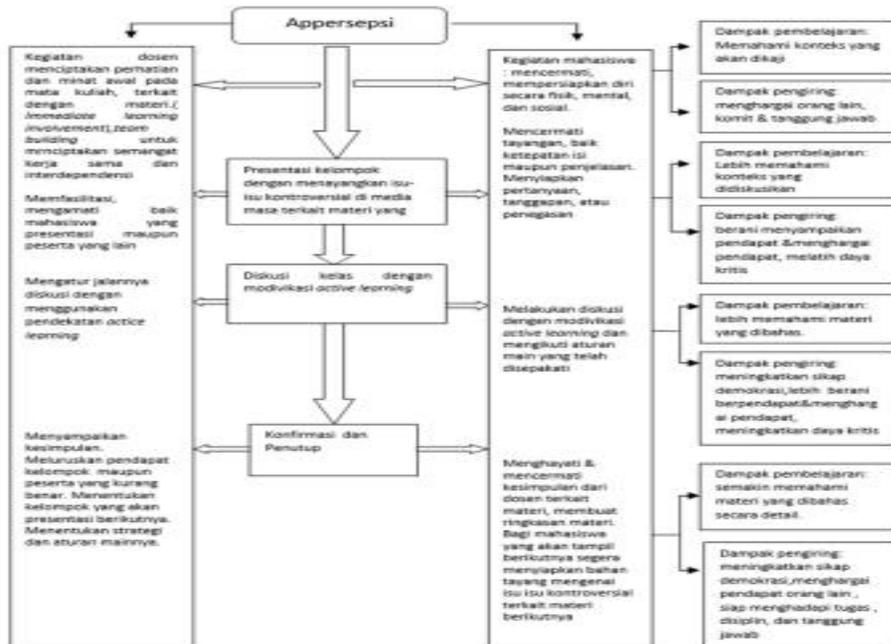
---

<sup>21</sup> Begini rencana Jerman membatasi dan memberantas hoax liputan kompas lihat {ada <http://tekno.kompas.com/read/2017/01/11/09582947/begini.rencana.jerman.berantas.hoax.di.media.sosial.indonesia>. diakses pada 22 Maret 2017

<sup>22</sup> Badan intelejen negara menyebutkan keberadaan medsos juga menjadi alat utama untuk mengkampanyekan gerakan radikal kepada para pemuda yang ada di Indonesia. Hal ini terungkap pasca penangkapan pelaku Bom Bunuh diri yang mengaku belajar merakit bom dari media social dan youtube; lihat [m.tribunnews.com/nasional/pelaku-belajar-merakit-dari-internet](http://m.tribunnews.com/nasional/pelaku-belajar-merakit-dari-internet). Diakses pada 23 Maret 2017

Sumardjoko yang menjadikan Isu kontroversial di Media Masa, sebagaimana *subject matter* dengan prosedur sebagaimana berikut;

**Figure 1.1**  
**Civic Education Learning Design based on Controversial Media Issues**



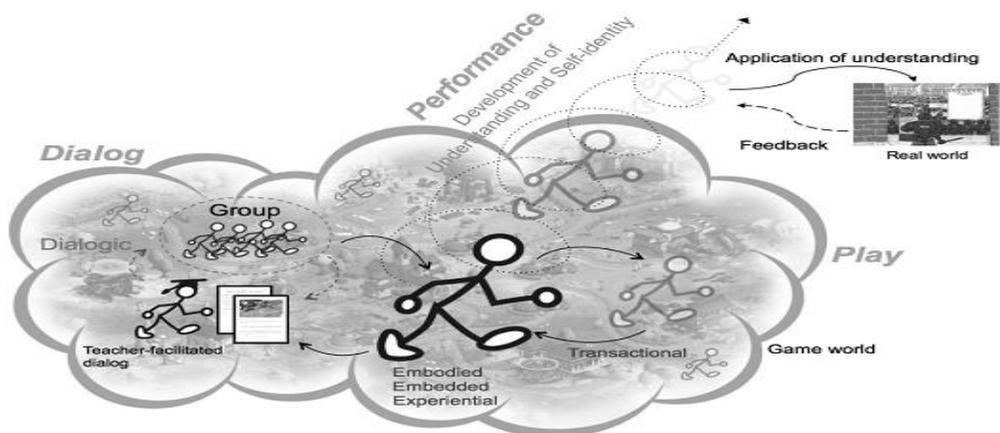
Alur-alur di atas dirancang berdasarkan pada hasil penelitian yang berusaha menilai sikap-sikap demokrasi mahasiswa, dalam konteks menanggapi isu-isu yang di era demokrasi. Keduanya juga menjelaskan; melalui pendekatan ini, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih partisipatif, semua bisa menjadi berbagi informasi, pemahaman, hingga menentukan sikap masing-masing. Dari sisi praktis, kelemahannya, model pembelajaran ini, akan lebih kausistik dan tentatif, tidak banyak memberikan informasi dan pengetahuan terkait kerangka teoritik.<sup>23</sup> Jadi, bisa jadi, pemahaman mahasiswa lebih tidak holistik. Untuk menghilangkan kelemahan tersebut, dibutuhkan proses transmisi pengetahuan yang lebih kreatif dari para pengajar, semisal; menyelenggarakan kegiatan lanjutan untuk secara spesifik membedah hal tersebut, secara teoritik. Kelemahan pendekatan normative, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, para pendidikan akan cenderung

<sup>23</sup> Ahmad Muhibbin & Bambang Sumardjoko “Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani” dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Vol 26 No 1 Juni 2016, 6-10

berhadapan dengan pola pikir membosankan, meski mereka sudah mengkontekstkan topik yang akan disajikan, tapi media-media pembelajarannya dan pendekatannya masih menggunakan pola yang lama. Maka dari itu, penulis juga berfikir bagaimana topik dan konteks yang sudah diperbaharui ini, bisa berubah menjadi lebih menyenangkan, menggembirakan, dan berdampak pada para siswa dibawah alam kesadaran mereka. Hal ini menjadi penting, karena dalam proses pematapan reduksi pengalaman akan kenegaraan menjadi lebih penting, dibandingkan pemahaman yang dia dapatkan (*more than civic knowledge and skill*).

Adapun pendekatan kreatif adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Yam San Chee *et all*. Dalam kerangkanya mereka mengatakan bahwa di era digital hari ini, lembaga pendidikan dan proses pembentukan karakter peserta didik memang membutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih terbaru. Misalnya, dengan membuat aplikasi nyata yang terkoneksi dari dua dunia berbeda; nyata dan maya. Melalui pendekatan rekayasa tekhnologis dia membuat *game star craft* yang tujuannya untuk membentuk karakter cinta tanah air.<sup>24</sup> Gambar berikut adalah salah satu alur yang tersistem dalam game tersebut;

**Figure 1.2**  
**School of citizenship and New Age of Media**



Secara garis besar, game ini dirancang untuk membentuk karakter dialog, pentingnya

<sup>24</sup> Yam San Chee, at all *Effective Game Based on Citizenship Education in The Age of New Media* (Singapore; EJJS, 2013), 25

bersama-sama mencapai tujuan, kemudian adanya proses pengamatan dari seorang guru dalam hal menentukan karakteristik-karakteristik yang ada di dalam sekolah. Game ini juga dibentuk berdasarkan berbasis kurikulum yang ada di sekolah.<sup>25</sup>

Diakui atau tidak, dua pendekatan di atas, pada proses pembelajaran akan hanya menghasilkan produk *civic knowledge* belum sampai pada instrumentasi *civic virtues and skill*. Apalagi hal itu dihadapkan pada produk teknologi yang perkembangan dan perubahannya sangat pesat. Perkembangan dan perubahannya sangat bergantung pada kondisi sosial, politik, dan kepentingan nasional yang ada di luar lembaga pendidikan. Ditambah lagi, perubahan dan perkembangan yang akan sangat berpengaruh terhadap cara dan pola hidup masyarakat secara langsung, karena kebergantungan mereka terhadap media sosial tersebut. Meski demikian, sebagai sebuah model dan pendekatan pendidikan kewarganegaraan, hal tersebut bisa dilakukan sebagaimana mestinya, dalam konteks dan konten yang termodifikasi lebih relevan dengan zaman. Lebih dari itu harus ada proses pengembangan dan pemahaman tentang karakteristik khusus terhadap produk teknologi tersebut; salah satunya adalah dengan melaksanakan proses *critical-literacy of social-media*. Atau dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan harus tetap melakukan proses pendidikan (dalam arti penyadaran) kepada peserta didik dalam memaknai informasi dan pengetahuan yang di dapat di luar lembaga pendidikan. Pada bagian selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana konsep *critical-literacy of social-media* bisa menjadi basis sikap pengajar, lembaga pendidikan, dan proses pendidikan yang ada di kelas; berbasis pada isu terhangat yang ada di Indonesia.

### **Citizenship Preconception based on Critical Media Literacy; Learning From Ahok Tragedy**

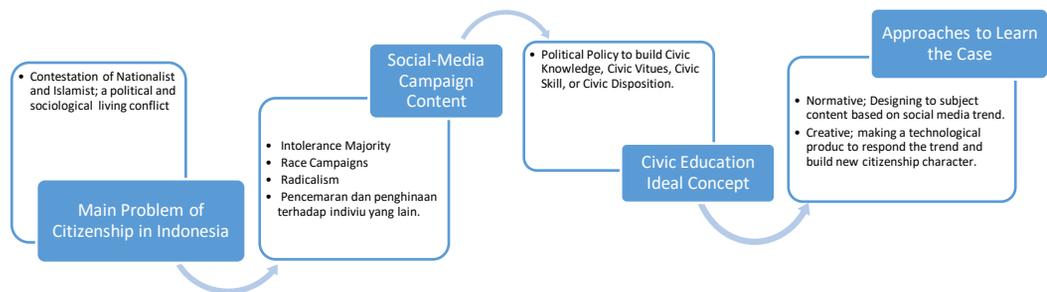
Sebelum melakukan proses rekonsepsi pendidikan kewarganegaraan, ada baiknya, penulis melakukan rekonstruksi ulang terhadap apa yang sudah dipaparkan sebelumnya; mulai dari problem klasik identitas kewarganegaraan di Indonesia, politik nasional dalam membentuk karakter Indonesia, teori pendidikan kewarganegaraan dan konsepsi produk yang dihasilkan, kemudian, tawaran teoritik

---

<sup>25</sup> San Chee, *Effective Game*, 25

yang berkembang pada pasca adanya produk-produk teknologi yang menjangkiti masyarakat dunia. Dari semua kerangka tersebut, selanjutnya, penulis akan menghadirkan ruang baru untuk memandang media pembelajaran berbasis sosial media sebagai basis yang bisa dijadikan ruang kritik berkelanjutan dan berkesinambungan, lebih-lebih pada konteks tragedi Pilkada Jakarta 2017.

**Figure 1.3**  
**Alur Asumtif dan Rekonsepsi Civic Education terhadap Media Sosial**



Asumsi faktual di atas, tentu, tidak akan menghasilkan produk masyarakat yang berkesadaran kritis. Pasalnya, posisi media sosial masih berada pada posisi asuntif, penanaman pemahaman, dan proses penciptaan produk teknologi dengan dimensi serupa. Posisi serupa akan dilakukan oleh kelompok yang menginginkan identitas kenegaraan Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kontestasi produk dan kampanye media sosial – melalui pola serupa – akan membingungkan peserta didik dan masyarakat di Indonesia. Misalnya, ketika para relawan politik tertentu menduplikasi cara-cara serupa terhadap pola kampanye kelompok lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah dan para pakar pendidikan mengusulkan perlunya *critical literacy* terhadap media sosial dan dikonstruksi melalui dunia pendidikan. Konsep *critical Media Literacy* bermakna; merubah makna fungsi literacy; able to access and understand, persuming able to create media content – *to analyze and evaluate media content, critique and synthesize meaning*; sedang endingnya adalah mencipta dan berpartisipasi membenarkan apa yang terjadi di dunia maya, sesuai

dengan asumsi kehidupan nyata.<sup>26</sup> Pendekatan baru ini, maka, desain pendidikan kewarganegaraan berbasis media masa atau sosial akan menjadi proses sebagaimana gambar berikut:

*Pertama*, penyampain identitas otentik masyarakat Indonesia; termasuk di dalamnya terkait konflik masa lampau, serta dinamika keragaman kekinian yang ada di Indonesia. Hal ini penting mengingat, tanpa adanya informasi yang benar akan identitas ini, perang informasi di media sosial tidak bisa diamputasi oleh kebijakan pemerintah. Media sosial, pada satu sisi, memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri. *Kedua*, memberikan proses pemahaman terhadap media sosial secara konprehensif; atau dalam bahasa yang lebih praktis, mengalokasikan satu sesi pembelajaran untuk memahami karakteristik media sosial. *Ketiga*, menjelaskan daya pembeda; antara benar dan salah; dalam berita, informasi, ilmu pengetahuan, dan lainnya, yang biasanya disebar di media sosial. *Keempat*, memberikan pemahaman akan dampak sosial dan implikasi hukumnya. *Kelima*, memberikan pemahaman bagaimana melakukan kritik terhadap media sosial yang mengkampanyekan identitas lain selain yang sudah diajarkan di sekolah. *Keenam*, melakukan kontrol dan menkonter balik apa yang disebarkan di media sosial, melalui media yang serupa. Misalnya, seorang guru mewajibkan para siswa mengikuti *fanspage* media sosial pribadinya.

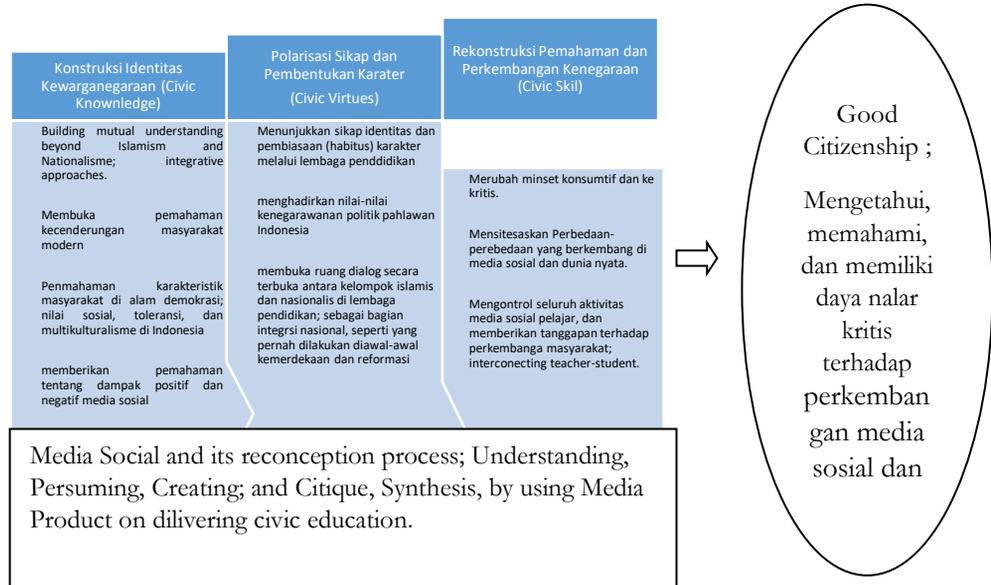
Dengan cara-cara yang demikian, kontrol terhadap para siswa akan bisa berjalan dengan seksama. Serta, seorang guru akan bisa membentuk interkoneksi antara dunia nyata dan dunia maya. Interkoneksi-dialogis ini akan menjadi kata kunci, akan proses keaksaraan kritis terhadap media sosial bisa dilakukan secara berkesinambungan, antara guru, siswa, dan stakeholder lembaga pendidikan. Perbedaan interkoneksi media maya dan sekolah ada pada ruang terkunci dan bebas. Sekolah, dalam hal kontrol terhadap media, tidak seperti negara dan provider internet, mereka bisa menutup bahkan menghapus media sosial. Sedangkan, sekolah hanya bisa memberikan pemahaman yang benar terkait konten-konten media sosial yang ada.

---

<sup>26</sup> Sonia Livingstoner, "Developing social media literacy: how children learn to interpret risky opportunities on social network sites" diakses melalui <http://eprints.lse.ac.uk/62129/> Available in LSE Research Online: May 2015, 12

Kembali pada fokus tulisan ini, apa yang terjadi dalam Pilkada Jakarta 2017 kemaren, merupakan dapat kurang pahamnya pengguna media sosial- termasuk kalangan pelajar dan anak muda – bahwa berita yang dikirimkan merupakan berita bohong. Mereka, pada satu sisi harus juga diakui, sudah dipengaruhi oleh sikap-sikap intoleran dari kelompok-kelompok tertentu, yang secara kreatif menciptakan produk teknologi; mulai dari gambar-gambar hasil editing komputer, video yang sudah dipotong secara konten, dan lain sebagainya. Dinamika sosial ini, harus disadari sehingga proses alamiah dan imbas dari kontestasi teknologis di dalam kehidupan berdemokrasi. Maka dari itu, mungkin bagan berikut ini akan menggambarkan bagaimana pendidikan kewarganegaraan bisa dikonstruksi berdasarkan proses *critical media literacy* dan tiga dimensi pendidikan kewarganegaraan:

**Figure 1.4**  
**Civic Education, Critical-Media literacy, and Creating Good Citizenship**



Pada intinya, ruang demokrasi-liberal yang ada di Indonesia, serta hilangnya kontrol kuasa terhadap pembentukan karakter masyarakat, mewajibkan lembaga pendidikan lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan desain pembelajaran, termasuk dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Pada satu sisi, dibutuhkan pendekatan konservatif agar terbentuk kesadaran kognitif (dilivering a subject as civic knowledge), kemudian dilanjutkan dengan pembentukan karakter; baik melalui

pembiasaan ataupun tauladan para guru yang ada di lembaga pendidikan (social-constuctivism), atau melakuka pendekatan adaptif terhadap kecenderungan yang ada di dalam masyarakat; salah satunya, melalui media sosial. Tapi, harus disadari, penggunaan media sosial membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran penuh untuk membedakan mana yang benar dan salah. Pemahaman dan kesadaran sempit terhadap makhluk baru ini, bisa jadi, akan menjerumuskan para peserta didik pada pemahaman, kebiasaan, dan identitas yang baru. Penggunaan media masa, game, dan media sosial sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, harus dibarengi dengan pola keaksaraan kritis terhadap media sosial. Bukan sebaliknya, mencukupkan diri bahwa media sosial itu penting untuk mengkonesksikan diri dengan orang lain.

Critical-Media Literacy (lihat Figure 1.4) sebagai fondasi memahami media sosial dan kasus atau tragedi kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini ada di Indonesia, diperuntukkan agar adanya kesadaran kienegaraan yang masih rentan apabila berhadap-hadapan dengan politik. Tragedi itu, mengingatkan Indonesia, bahwa media sosial berwajah dua; menyatukan dan memecah, menginformasikan kebenaran dan kebohongan, mengangkat popularitas dan sekaligus menghancurkannya, dan seterusnya. Oleh sebab itulah, hari keaksaraan kritis itu sangat dipentingkan untuk membentuk karakter baru masyarakat modern di Indonesia.

## **Penutup**

Dari pembahasan panjang di atas, sejatinya, hanya tiga hal penting yang ingin dijelaskan pada tulisan ini; *pertama*, belum adanya keterhubungan dan kesatuan identitas otentik yang dipahami oleh masyarakat Indonesia, selama 71 Tahun kemerdekaannya. Mereka masih berada pada fase kerentanaan identitas kebangsaan. Hal ini terbukti dari masih banyaknya sikap-sikap intoleransi yang terjadi di dalam masyarakat. Intoleransi di Indonesia, dalam aspek kesejarahan, harus ditelakkan pada posisi seperti api dalam sekam. Artinya, konflik ini tertanam dan diamkan tanpa proses rekonstruktif menghilangkan bara api tersebut. Konflik ini cenderung hadir ke permukaan apabila ada kepentingan elit politik sedang berkntetasi berebut kekuasaan

tertentu. Konflik ini penulis sederhanakan menjadi dua, yakni; kelompok nasionalisme dan islamisme.

*Kedua*, dari problem di atas, tentu, pendidikan akan menjadi basis utama menghapus luka tependam tersebut. Pendidikan kewarganegaraan (PKn, PMP, dan PPKn) merupakan ujung tombak merombak paradigma dikotomis di atas. Hanya saja, konsep-konsep yang ditawarkan di Indonesia, masih belum mampu menyelesaikannya. Apakah itu melalui pendekatan politik ataupun pendekatan pedagogis. Di pihak yang lain, problem pedagogis ini ditambah dengan munculnya kecenderungan baru masyarakat, yakni; ketergantungan dan keterjangkitan para pelajar terhadap media sosial. Makhluk baru yang bisa berdampak positif ataupun sebaliknya. Para pakar pendidikan pun menghadirkan produk tekhnologis ini sebagai sumber belajar di sekolah, khususnya untuk menciptakan kesadaran kewarganegaraan. Mulai dari isu kekinian, hingga membuat produk kreatif. Hanya saja, peran dan kerangka ini, tidak bisa bertahan lama, sebab para pemecah identitas itu melakukan hal serupa untuk proses instabilitas sosial dan merencanakan tujuan politik tertentu.

*Ketiga*, sebagai jalan keluar dari dua problem tersebut, maka penulis menawarkan sebuah pendekatan lama – dalam dimensi kajian lain – namun baru pada konteks pembelajaran PKn. Yakni, *critical-social Literacy*. Melalui pendekatan ini, maka media sosial sebagai basis, fondasi, *learning approache*, sebelum mengaitkan tema-tema informatif yang ada di media sosial. Keaksaraan kritis terhadap media sosial akan menjadi pintu masuk para peserta didik untuk menilai, mengevaluasi, membuat, dan mentransmisikan informasi yang ada di media sosial. Jadi, kesadaran kritis mereka, akan menjadi filter tersendiri bagi dirinya sendiri. Khusus pada *grade* pendidikan yang lebih kecil, kontrol guru sangat penting. Bukan untuk melarang para siswa membuat media sosial, melainkan mengamati dan memberikan pemahaman ulang terhadap isu yang berkembang di media sosial

Jadi, apapun pendekatan normatif dan model kreatif untuk mengkoneksikan kehidupan nyata dan mayas, dalam pendidikan kewarganegaraan, harus dimulai dengan pemberian pemahaman terlebih dahulu akan isi, informasi, dan

kecenderungan negatif media sosial. Tujuannya, agar produk-produk tekhnologis tersebut tidak menjadi kontraproduktif bagi pembangunan dan pembentukan identitas, karakter, dan model masyarakat Indonesia yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Interkonektifitas media sosial dan kehidupan maya juga akan menentukan cara pandang siswa terhadap fenomena yang akhir-akhir ini melanda dunia secara luas.

## Referensi

- Ahier, John, Et. Al., *Issues of Citizenship and Higher Education* London; Ruotledge Falmer, 2005
- Apple, Michael W., *The States and Politics of Knowledge*, New York, Taylor Francis, 2003
- Buya Syafi'i, "Ada ideology impor yang salah arab", <http://m.detikcom/news/berita-jawa-tengah/d-3585541/tentang-budaya-intoleransi>, diakses pada 4 Agustus 2017
- Demaine, Jack, ed, *Citizenship and political education today*, New York; Palgrave Macmillan, 2004
- Livingstoner, Sonia "Developing social media literacy: how children learn to interpret risky opportunities on social network sites" diakses melalui <http://eprints.lse.ac.uk/62129/> Available in LSE Research Online: May 2015, 12
- [m.tribunnews.com/nasional/pelaku-belajar-merakit-dari-internet](http://m.tribunnews.com/nasional/pelaku-belajar-merakit-dari-internet). Diakses pada 23 Maret 2017
- Milahidis, Paul., *media literacy: empowering youth worldwide*, New York: NED & CIMA, 2009
- Moor, Rob., "Graduate Citizen?; Evidence and interpretation", in John Ahier Et. Al. *Issues of Citizenship and Higher Education*, London: Ruotledge Falmer, 2005
- Muhibbin, Ahmad & Bambang Sumardjoko, "Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 26. No. 1. Juni 2016
- San Chee, Yam, Et. Al., *Effective Game Based on Citizenship Education in The Age of New Media*, Singapore; EJJS, 2013
- Suaedy, Achmad, dkk., "Laporan Tahunan Kerukunan Keberagaman di Indonesia" Jakarta; The Wahid Institute, 2014
- Tilaar, HAR., *Pendidikan dan Kekuasaan* Bandung; Rinneka Cipta Press, 2003
- Tim Survey Setara Institute, "Laporan Survei Toleransi Siswa Negeri di Jakarta dan Bandung Raya", Jakarta; Setara PDF version, 2016

### **Internet**

<http://autotekno.sindonews.com/read/1166757/183/jokowi-akui-pengguna-media-sosial-di-indonesia-sadis-1483001812> diakses pada 21 Juni 2017

<http://autotekno.sindonews.com/read/1166757/183/jokowi-akui-pengguna-media-sosial-di-indonesia-sadis-1483001812> diakses pada 21 Maret 2016

<http://tekno.kompas.com/read/2017/01/11/09582947/begini.rencana.jerman.berantas.hoax.di.media.sosial.indonesia>. diakses pada 22 Maret 2017

<http://tekno.liputan6.com/read/2823721/95-persen-orang-indonesia-install-aplikasi-media-sosial-di-ponsel> diakses pada 21 Maret 2017

Kominfo.or.id